

## ABSTRAK

### **UPAYA PAIMAN SELAKU DEBITOR MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MELAKUKAN PEMBATALAN LELANG (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 459/K/PDT.SUS-BPSK 2017)**

Dalam pokok perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 459/K/Pdt.Sus-BPSK 2017 bahwa Paiman telah melakukan perjanjian kredit dengan Bank Mandiri pada tanggal 21 November 2011 dengan nomor CDO. KSR/0045/KMK/2011. Paiman tidak dapat memenuhi prestasinya, sehingga berdasarkan perjanjian kredit tersebut Bank Mandiri akan melakukan pelelangan terhadap obyek jaminan berupa tiga buah Tanah Hak Milik. Paiman dapat dikatakan ingkar janji atau wanprestasi, didasarkan atas perjanjian kredit tersebut. Namun, ketika lelang akan dilaksanakan Paiman mengajukan keberatan dan pembatalan lelang ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Berdasarkan hal tersebut terdapat 2 (dua) pokok permasalahan dalam tesis ini, yaitu: 1. Apakah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat dijadikan dasar ke Pengadilan Negeri untuk membatalkan lelang; 2. Apa upaya hukum di luar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bagi pemilik barang yang barangnya digunakan ke Bank yang merasa dirugikan karena adanya lelang eksekusi oleh Bank Mandiri sebagai pemegang jaminan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian tesis adalah putusan BPSK tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan lelang, karena putusan BPSK tidak mempunyai kekuatan eksekusi sebagaimana putusan pengadilan. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugat perlawanan terhadap sita eksekusi pada Pengadilan Negeri dengan mendasarkan pada Pasal 207 HIR/Pasal 225 RBg.

**Kata Kunci : Upaya Hukum, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pembatalan Lelang.**

## ***ABSTRACT***

### ***PAIMAN'S EFFORT AS THE DEBTOR THROUGH THE CONSUMER DISPUTE RESOLUTION AGENCY IN CANCELING THE AUCTION (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 459/K/PDT.SUS-BPSK 2017)***

*In the subject matter of the decision of the Supreme Court number 459/K/Pdt.Sus-BPSK 2017 that Paiman has entered into a credit agreement with Bank Mandiri on November 21, 2011 under number CDO. KSR/0045/KMK/2011. Paiman cannot fulfill his performance, so based on the credit agreement, Bank Mandiri will conduct an auction towards 3 (three) private properties. Paiman can be said to be a default based on the credit agreement. But, when the auction will be held, Paiman filed an objection and cancelation of the auction to the consumer dispute resolution agency. There are 2 (two) main issues: 1. Can the decision of the consumer dispute resolution agency be the basis for the district court to cancel the auction; 2. What legal remedies are outside the consumer dispute resolution agency for the owner of the collateral objects that feels aggrieved because of an auction conducted by Bank Mandiri as a holder of collateral. Type of research used in this study is normative legal, therefore the approach used in this study are statute approach, conceptual approach and case approach. The result of this research is that the decision of the consumer dispute resolution agency cannot be used as a basis for canceling the auction, because the decision of the consumer dispute resolution agency does not have a power of execution as a court judgment. The injured party can file a lawsuit against the confiscation of execution in the district court based on Article 207 HIR/Article 225 RBg.*

***Key Words : Legal Effort, Consumer Dispute Resolution Agency, Auction Cancellation***